



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andap Budhi Revianto

Jabatan : Pjt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Pjt. Sekretaris Jenderal



Andap Budhi Revianto

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Agus Toyib
NIP. 196306171985031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi. 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	82,0 88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92% 92%
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

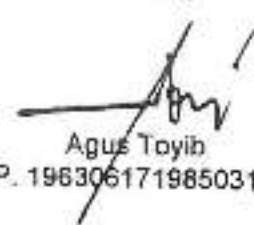
Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 15,531,727,000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 15,531,727,000,-

Pihak Kedua,
PIH. Sekretaris Jenderal


Andap Budhi Revianto

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Banten

Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

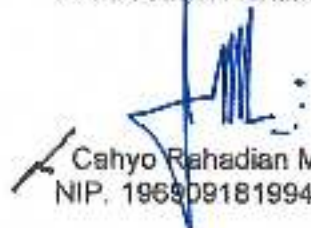
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

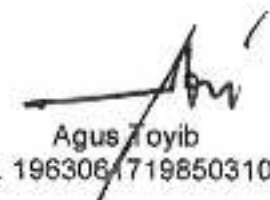
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909181994031001


Agus Toyib
NIP. 196306171985031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	84%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.066.480.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.066.480.000,-

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib


Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Banten



Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Agus Toyib
NIP. 196306171985031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	40%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60%
		3. Persentase menurunnya residivis	1%
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	75
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	75
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	40
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	60

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	60
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	70

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%
		2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%
		3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%
		2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
		4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%
		5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
		6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%
		7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%
		2. Persentase Anak Yang Mendapatkan	50%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Putusan Pidana Penjara 3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat 2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar 4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70% 100% 70% 70%
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	75% 60% 75% 60%
8.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	71% 92% 95% 60% 75% 75% 60% 23%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakatan dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakatan (Lapas)	1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 102.578.405.000,-
Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	Rp. 102.578.405.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 127.096.498.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan	Rp. 127.096.498.000,-

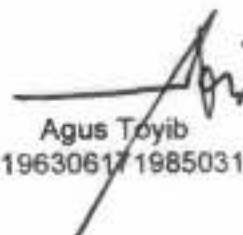
Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Masyarakatan



Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Banten


Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jhoni Ginting

Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Jhoni Ginting
NIP. 196106121989031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Agus Toyib
NIP. 196306171985031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.610.694.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 7.610.694.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 28.780.889.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 28.780.889.000,-

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi



Jhoni Ginting
NIP. 196106121989031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Banten

Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Freddy Harris

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Freddy Harris
NIP. 196611181994031001

Agus Toyib
NIP. 196306171985031002